

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Format Pedoman Wawancara

#### Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Nama :

Jabatan :

Nama Bidang :

Hari, Tanggal :

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana menurut Anda kondisi perekonomian daerah di Kabupaten Buleleng?
2.	Berdasarkan rewiu renstra tahun 2017-2022 dan renstra tahun 2023 dan 2026, dikatakan bahwa permasalahan yang dialami BPKPD Kabupaten Buleleng adalah tingkat PAD yang masih rendah dan pengelolaan keuangan yang belum optimal. Apakah menurut Anda kondisi tersebut sudah teratasi atau sudah mulai teratasi?
3.	Dari pihak BPKPD bagaimana cara melakukan pengukuran kinerja keuangan biasanya?
4.	Kapan melakukan pengukuran kinerja keuangandi BPKPD?
5.	Siapa saja biasanya yang melakukan pengukuran kinerja keuangan di BPKPD?
5.	Apakah menggunakan pengukuran kinerja keuangan berupa analisa rasio?
6.	Menurut Ibu, keputusan yang seperti apa saja yang dapat menggunakan analisa rasio untuk mengambil keputusan?
7.	Mengapa memilih rasio tersebut untuk mengukur kinerja keuangan?
11.	Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat rasio keuangan BPKPD Kabupaten Buleleng?
12.	Menurut Anda, berdasarkan hasil analisa ini apa langkah, harapan, dan saran yang dapat Anda usulkan atau berikan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan di BPKPD Kabupaten Buleleng?

#### Bidang Perencanaan

Nama :

Jabatan :

Nama Bidang :

Hari, Tanggal :

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana cara menggolongkan rendah atau tinggi PAD dan pengelolaannya?
2.	Apa Indikator kinerja keuangan yg digunakan selama ini untuk mengukur kinerja keuangan itu?
3.	Kapan dan siapa saja biasanya yang melakukan pengukuran kinerja keuangan di BPKPD?

## Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Narasumber 1:

Nama : Putu Ayu Mira Kusuma Dewi

Jabatan : Kepala Bidang

Nama Bidang : Akuntansi dan Pelaporan

Hari, Tanggal : Selasa, 19 Maret 2024

Pewawancara : Bagaimana menurut Ibu kondisi perekonomian daerah di Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Kalau dilihat dari kondisi perekonomian daerah di Kabupaten Buleleng dengan mengacu pada laju pertumbuhan ekonomi ini yakni satu dari indikator yang digunakan untuk menyelenggarakan penilaian dan evaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah khususnya di Kabupaten Buleleng ini jika melihat realisasi angka di tahun 2022 dengan membandingkan dengan kondisi di 2023 tentunya untuk laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 0,53%. Data ini berdasarkan data dari BPS. Selama kurun waktu 2022-2023 itu seperti yang telah disampaikan tadi 2022 laju pertumbuhannya di 3,11% kemudian 2023 di angka 3,64%. Tentunya dengan peningkatan ini diharapkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat meningkat juga, kemandirian juga.

Pewawancara : Berdasarkan reuiu renstra tahun 2017-2022 dan renstra

tahun 2023 dan 2026, dikatakan bahwa permasalahan yang dialami BPKPD Kabupaten Buleleng adalah tingkat PAD yang masih rendah dan pengelolaan keuangan yang belum optimal. Apakah menurut Anda kondisi tersebut sudah teratasi atau sudah mulai teratasi?

Narasumber : Untuk 2017-2022 masih ada covid di tengahnya, kemudian juga proses validasi dan verifikasi piutang, kemudian di 2022 di Buleleng sempat mengalami wabah penyakit sapi dan mulut yang menjadi perhatian pemerintah pusat karena berpengaruh pada capaian retribusi sehingga berpengaruh pada PAD. Untuk sapi itu termasuk di retribusi rumah potong hewan. Terus untuk di tahun 2023-2026 saya rasa ini sudah mengalami peningkatan yang jauh dibandingkan di tahun 2017-2022. Kemudian untuk PAD yang rendah di tahun 2023-2026 permasalahan-permasalahan akan banyak yang sudah diatasi dengan inovasi-inovasi yang dilakukan dalam rangka optimalisasi untuk Pendapatan Asli Daerah mulai dari *digital system, digital payment, digital information*. Kemudian selain dari digitalisasi tadi, mungkin dari regulasi pembaharuan regulasi apalagi saat ini telah tersedia UU baru yang baru terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah kita sudah buatkan perdanya yang pastinya banyak target-target pajak yang ditetapkan itu

berbeda, dari sisi retribusi ada beberapa retribusi 2017-2022 ada, 2023 masih ada, dan di 2024 ada 7 retribusi yang hilang.

Pewawancara : Dari pihak BPKPD bagaimana cara melakukan pengukuran kinerja keuangan biasanya?

Narasumber : Kalau kami biasanya hanya melihat dari anggarannya berapa dan realisasinya berapa. Kalaupun dari sisi belanja, jumlah realisasi belanja lebih sedikit daripada anggaran tidak serta merta kondisinya tidak baik tetapi kita melakukan efisiensi. Kita tidak harus menghabiskan berapa anggaran belanja yang sudah dianggarkan. Tetapi kalau untuk target kita gali semaksimal mungkin. Tapi kalau untuk belanja kita efisiensi dan yang mana menjadi prioritas.

Pewawancara : Kapan biasanya yang melakukan pengukuran kinerja keuangan di BPKPD?

Narasumber : Yang melakukan kinerja keuangan itu di bagian perencanaan. Biasanya kami untuk kinerja fisik sudah tercapai 100%, tetapi kinerja keuangannya belum tercapai 100% artinya disitu kita melakukan efisiensi. Efisiensi dengan tidak mengurangi kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

Pewawancara : Siapa saja biasanya yang melakukan pengukuran kinerja keuangan di BPKPD?

Narasumber : Pengukuran kinerja keuangan dilakukan saat evaluasi triwulan untuk melihat perkembangan keuangan.

Pewawancara : Apakah menggunakan pengukuran kinerja keuangan berupa analisa rasio?

Narasumber : Untuk saat ini belum.

Pewawancara : Menurut Ibu, keputusan yang seperti apa saja yang dapat menggunakan analisa rasio untuk mengambil keputusan?

Narasumber : Dari analisa rasio ini mungkin banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dapat menggunakan analisa ini seperti kebijakan dalam pengelolaan pendapatan atau pendapatan belanja ya pengelolaan keuangan intinya. Kemudian dengan analisa rasio ini, pendapatan daerah kita bisa tahu pendapatan kita tercapai berapa persen di masing-masing rentang tahunnya begitu juga dengan belanjanya. Dari situ kita bisa mengambil upaya-upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan BPKPD ini. Sehingga sebenarnya banyak manfaat yang diperoleh dari analisa rasio ini.

Pewawancara : Apakah strategi atau program-program pada Renstra yang telah direncanakan dan dilaksanakan sudah dapat mempengaruhi tingkat PAD dan pengelolaan keuangan.

Narasumber : Tentu saja sudah karena renstra itu menjadi acuan kita untuk melakukan upaya-upaya karena renstra ini kan di rancang nih rencananya upayanya, kemudian kita bikin, dan dalam perjalannya tidak masalah kita melakukan

inovasi atau pengembangan-pengembangan untuk mendukung tercapainya program-program kegiatan yang tercantum pada renstra

Pewawancara : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan BPKPD Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Dari BPKPD sendiri dipengaruhi oleh pendapatan transfer, pendapatan daerah, dan dari sisi realisasi belanja.

Pewawancara : Menurut Anda, berdasarkan hasil analisa ini apa langkah, harapan, dan saran yang dapat Anda usulkan atau berikan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan di BPKPD Kabupaten Buleleng?

Narasumber : Menurut kami di BPKPD, analisa rasio ini ternyata penting untuk melihat bagaimana sih potret dari keuangan BPKPD lebih rinci lagi dilihat dari tingkat efektifitas, efisiensi, pertumbuhan, keserasian, derajat desentralisasi. Kalo kita secara umum kan hanya membandingkan anggaran dan realisasi baik itu pendapatan maupun belanja. Itu secara umum, tapi ini lebih menghusus lagi, lebih mendetail lagi. Mudah-mudahan kedepan kita bisa mencontoh, bisa kita terapkan analisa rasio ini dalam upaya untuk melihat pengelolaan keuangan di BPKPD.

Narasumber 2:

Nama : Deny Mahardika

Jabatan : Fungsional Umum

Nama Bidang : Perencanaan Anggaran

Hari, Tanggal : Rabu, 24 April 2024

Pewawancara : Bagaimana cara menggolongkan rendah atau tinggi PAD dan pengelolaannya?

Narasumber : Untuk menggolongkan rendah atau tinggi PAD yaitu dengan membandingkan Jumlah realisasi PAD dengan target sudah ditetapkan oleh TAPD bersama Legislatif dan pengelolaannya untuk membiayai pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas. Setelah ditetapkannya target PAD maka dibuatlah perjanjian kinerja antara penerima mandat dengan pemberi mandat. Kemudian mewujudkan perjanjian kinerja tersebut disusunlah Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja dan hasil dari pelaksanaannya diukur dengan Capaian Rencana Aksi atas perjanjian kinerja bulanan maupun triwulanan dan Lkjip untuk tahunannya sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja berikutnya.

Pewawancara : Apa Indikator kinerja keuangan yg digunakan selama ini untuk mengukur kinerja keuangan itu?

Narasumber : Indikator kinerja yang digunakan pada BPKPD Kabupaten buleleng berpedoman pada Indikator Kinerja Utama atau IKU

yang tercantum pada RENSTRA BPKPD yang sudah ditetapkan sebelumnya dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng. BPKPD Kabupaten Buleleng mempunyai 3 Sasaran/Indikator Kinerja Utama yaitu sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah, kemudian sasaran kedua Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase pengelolaan barang milik daerah yang baik, dan sasaran utama yang ketiga Terwujudnya PAD yang sesuai target dengan indikator kinerja Jumlah Realisasi PAD. Selain ketiga IKU tersebut BPKPD juga mempunyai 1 sasaran/indikator Kinerja penunjang yaitu Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pewawancara : Kapan dan siapa saja biasanya yang melakukan pengukuran kinerja keuangan di BPKPD?

Narasumber : Pengukuran kinerja melibatkan perbandingan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual terhadap sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang sudah dicapai. Pengukuran kinerja pada BPKPD Kabupaten Buleleng dilakukan secara periodik setiap bulanan, triwulanan dan tahunan. Untuk pengukuran kinerja bulanan dan triwulanan

disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya sedangkan pengukuran kinerja tahunan dilaksanakan setiap akhir tahun dan disampaikan pada awal bulan Januari tahun berikutnya. Pengukuran kinerja BPKPD Kabupaten Buleleng dikoordinir oleh Sekretaris BPKPD Kab. Buleleng yang pengumpulan datanya dilaksanakan oleh yang menangani perencanaan.



**Lampiran 3 Surat-surat Penelitian**  
Surat Penelitian dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830  
Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

Nomor : 624/UN48.13.1/DL/2024

Singaraja, 17 April 2024

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Data dan Penelitian*

Kepada Yth. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPD Kabupaten Buleleng  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : Made Risma Yuliani  
NIM. : 2257025002  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan/Prodi. : Ekonomi dan Akuntansi / D4 Akuntansi Sektor Publik

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon izin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dr. Dra. Ni Made Suci, M. Si.  
NIP. 196810291993032001



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Udayana No. 11 Singaraja-Bali. Telepon : (0362) 26830  
Website : <http://www.fe.undiksha.ac.id/>

Nomor : 624/UN48.13.1/DL/2024

Singaraja, 17 April 2024

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Data dan Penelitian*

Kepada Yth. Kepala Bidang Perencanaan BPKPD Kabupaten Buleleng  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha menerangkan bahwa mahasiswa/i tersebut dibawah ini :

Nama : Made Risma Yuliani  
NIM. : 2257025002  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan/Prodi. : Ekonomi dan Akuntansi / D4 Akuntansi Sektor Publik

Bermaksud mengadakan penelitian lapangan untuk menempuh atau menyusun tugas akhir, skripsi dan melengkapi tugas lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon izin agar mahasiswa kami dapat diterima dan diberikan data di tempat yang Bapak/Ibu/Sdr. Pimpin.

Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dr. Dra. Ni Made Suci, M. Si.  
NIP. 196810291993032001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia

## Surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
 Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng  
 Telp. (0362) 22063 Singaraja  
 Alamat e-mail : [dpmptsp@bulelengkab.go.id](mailto:dpmptsp@bulelengkab.go.id)  
 Website : [dpmptsp.bulelengkab.go.id](http://dpmptsp.bulelengkab.go.id)

Nomor : 503/342/REK/DPMPTSP/2024  
 Lamp : "  
 Perihal : **Rekomendasi**

Kepada :  
 Yth. Kepala Badan Pengelolaan  
 Keuangan dan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Buleleng

di  
Tempat

### I. Dasar :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Surat dari WD. I Fakultas Ekonomi Undiksha Singaraja Nomor 785/UN48.13.1/DU/2024 Tanggal 02 Mei 2024 Perihal Permohonan Data dan Penelitian

### II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Made Risma Yuliani  
 NIK : 5108066807020001  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jl. Pulau Batam Gg. Kasuari I/3 Banyuning Barat, Kecamatan Buleleng  
 Bidang / Judul : Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan di BPKPD Kabupaten Buleleng  
 Jumlah Peserta : 1 orang  
 Lokasi : BPKPD Kabupaten Buleleng  
 Lamanya : 6 bulan (01 Desember 2023 – 31 Mei 2024)

### III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
- Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
- Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
- Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
- Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA  
 PADA TANGGAL : 08 MEI 2024



### Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
- Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
- Camat Setempat
- Yang Bersangkutan
- Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara

**Lampiran 4 Dokumentasi Proses Wawancara**  
**Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

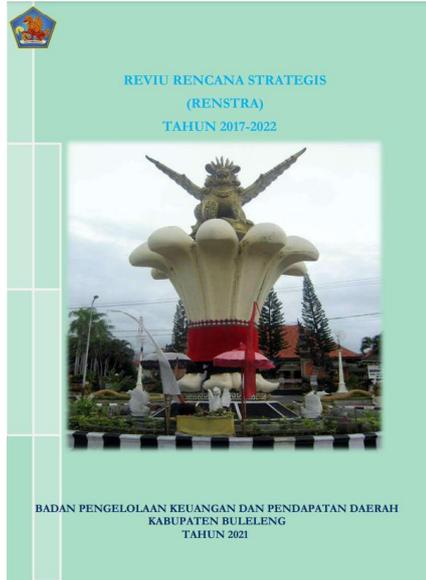


**Bidang Perencanaan**



## Lampiran 5 Reviu dan Rencana Strategis BPKPD Tahun 2017-2026

### Reviu renstra 2017-2022



Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, maka peranan BPKPD sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok yang sedang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng adalah "Masih rendahnya PAD, Kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah masih belum optimal". Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Buleleng PAD masih rendah dan Kemampuan pengelolaan

#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

keuangan dan aset daerah masih belum optimal dan dengan potensi yang ada akan dimaksimalkan.

### Renstra 2023-2026



#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng masih menemukan permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja dari BPKPD. Perlu dilakukan identifikasi permasalahan agar menjadi acuan yang jelas, tepat, dan membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKPD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pengelolaan Keuangan Belum Optimal	Sistem Pengelolaan Keuangan Belum terintegrasi  Penyerapan belanja belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja yang diatur dalam anggaran kas	Sistem Pengelolaan Keuangan menggunakan SIPD yang masih dikembangkan  Realisasi masih berdasarkan Sumber dana dan SKPD melaksanakan kegiatan yang tidak tepat waktu
2	Sumber pembiayaan pembangunan daerah dari Pendapatan Asli Daerah belum optimal	Pendapatan Daerah dari PAD belum Optimal	Pemahaman SDM pengelola keuangan terhadap kebijakan keuangan belum memadai  Belum Optimalnya sistem pengelolaan pendapatan daerah  Tingkat kesadaran wajib pajak belum sepenuhnya
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah belum memadai	Pengelolaan BMD yang belum optimal dan memberikan manfaat bagi finansial	Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum terbit  Sumber daya pengelola aset belum mendapat perhatian yang layak  Belum optimal pemanfaatan Aset

## RIWAYAT HIDUP



Made Risma Yuliani lahir di Tejakula pada 28 Juli 2002. Penulis adalah anak dari Ketut Nuarta dan Wayan Sutarini. Penulisnya orang Indonesia dan Hindu. Sekarang yang penulis katakan adalah Jalan Pulau Batam No. 25, Banyuning Barat, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 3 Banjar Jawa dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan menengah di SMPN 6 Singaraja dan lulus pada tahun 2017. Penulis lulusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari SMAN 4 Singaraja. Pada tahun 2017 dan saat ini sedang menempuh pendidikan D-IV Akuntansi Sektor Publik dari Jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada triwulan terakhir tahun 2024, penulis menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan BPKPD Kabupaten Buleleng”. Selain itu, pada tahun 2024 hingga saat penulisan makalah terbaru ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program D-IV Akuntansi Sektor Publik di Universitas Ganesha.

